

**ANALISIS KINERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN
DAN JEMBATAN MALANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen**

Oleh :

**Retno Kusuma Ningsih
NPM. 22202081014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PASCASARJANA
MALANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan anggaran, mekanisme pengawasan, peran masyarakat dan kinerja organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang melalui peran masyarakat sebagai moderasi. teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Proportionate stratified random sampling* dari jumlah sampel berdasarkan masing-masing bagian. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan aplikasi PLS versi 3.0.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi, mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Peran masyarakat tidak mampu memediasi antara kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi dan peran masyarakat tidak mampu memediasi antara mekanisme pengawasan terhadap kinerja organisasi.

Kata Kunci: kebijakan anggaran, mekanisme pengawasan, peran masyarakat dan kinerja organisasi.



ABSTRACT

This study aims to describe budget policy, monitoring mechanism, community role and organizational performance both directly and indirectly through the role of the community as moderation. The sampling technique used in this study is the Proportionate stratified random sampling technique from the number of samples based on each section. The data analysis tool used is the Structural Equation Modeling (SEM) analysis using the PLS version 3.0 application.

Based on the results of the data analysis, it shows that budget policy affects organizational performance, monitoring mechanisms affect organizational performance. The role of the community is unable to mediate between budget policy and organizational performance and the role of the community is unable to mediate between monitoring mechanisms and organizational performance.

Keywords: *budget policy, monitoring mechanisms, community roles and organizational performance.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Prasarana transportasi darat berupa infrastruktur jalan dan jembatan merupakan tulang punggung bagi konektivitas suatu wilayah. Sebagai penghubung antar lokasi, jaringan jalan dan jembatan tidak hanya memfasilitasi mobilitas barang dan manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, interaksi sosial, serta pertukaran budaya di suatu daerah. Di Indonesia, panjang jalan yang tersebar melintasi berbagai kawasan menurut kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) jenis: Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, dan Jalan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018 Tanggal 10 Juli 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dalam mengatur dan memastikan kualitas serta keberlanjutan prasarana transportasi ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang memainkan peran sentral. Sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang memiliki tanggung jawab yang luas dalam mendukung kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapat dari pihak terkait menegaskan pentingnya peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur transportasi darat. Dalam konteks ini, kinerja organisasi menjadi fokus utama, di mana efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta pengendalian yang ketat menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai kebijakan anggaran dan implementasinya dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang menjadi esensial untuk menjamin kelancaran dan kemajuan sektor transportasi darat di suatu wilayah.

Di Indonesia pengelompokan jalan diatur di UU No. 22 Tahun 2009. Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintahan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/207/KPTS/013/2023 Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer,

Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal, Sekunder, Dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur, dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang adalah yang bertugas untuk menangani jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Berikut adalah daftar penanganan Ruas Jalan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang.

Nama Ruas	Link	Panjang (KM)
Bts. Kota Batu-Bts.Kab.Kediri	187	39,95
Bts. Kota Malang-Bts.Kota Batu (Sengkaling)	188	1,79
Bts. Kota Malang-Turen	189	19,97
Karanglo – Bts.Kota Batu (Karangploso)	190	8,00
Jln. Raya Cangar	191.11K	7,72
Jln. Raya Tulungrejo	191.12K	7,19
Jln. Raya Punten	191.13K	1,50
Jln. Bukit Berbunga	191.14K	2,40
Jln. Brantas	191.15K	0,84
Jln. Trunojoyo	192.11K	4,54
Jln. P. Sudirman	192.12K	1,58
Jln. Gajah Mada	192.13K	0,25
Jln. Diponegoro	192.14K	1,35
Jln. Pattimura	192.15K	1,36
Jln. Ir. Soekarno	192.16K	5,16
Jln. Dr. M. Hatta	193,11K	2,21
Jln. Tlogomas	188.11K	2,32

Jln. Mayjend Hariyono	188.12K	1,85
Jln. Soekarno - Hatta	188.13K	2,69
Jln. Borobudur	188.14K	1,09
Jln. A. Yani	188.15K	1,58
Jln. Kol. Sugiono	189.11K	1,07
Total penanganan		116,41

Dasar Hukum, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Setiap tahun Pemerintah selalu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan terhadap ruas-ruas jalan di seluruh Indonesia baik pada jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, akibat terjadinya kerusakan dini pada ruas jalan tersebut. Demikian pula halnya dengan jalan-jalan di Provinsi Jawa Timur yang umumnya terjadi kerusakan dini yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat umur rencana belum tercapai.

Banyak pernyataan mengenai penyebab kerusakan jalan hanya didasarkan dari penglihatan semata misalnya karena pengaruh air dan beban kendaraan yang melebihi beban rencana. Kerusakan dini perkerasan jalan lebih banyak disebabkan oleh kegagalan konstruksi pada saat pelaksanaan karena ketidak tepatan implementasi standar mutu. Setelah itu, diperparah lagi dengan kegagalan bangunan akibat sistem drainase permukaan jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Beban lalu lintas bukan satu-satunya penyebab eksternal yang dominan terhadap kerusakan dini, pertumbuhan beban lalu lintas yang

tinggi tidak akan merusak perkerasan jalan daerah jika pelaksanaan dan pengendalian mutunya tepat dan benar sesuai standar. Membangun suatu jalan yang mantap dan baik sesuai dengan spesifikasi teknis, memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan intelektual yang tinggi untuk bisa menerapkan spesifikasi teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana lapangan agar konstruksi jalan yang akan dibangun atau ditingkatkan sesuai harapan.

Tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan tingkat efektivitas pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkala dan terus menerus. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara dan daerah khususnya di bidang infrastruktur. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut terbentuk dari berbagai macam sektor yang secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan daerah tersebut. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan perlu didukung oleh berbagai faktor baik ekonomi maupaun faktor non ekonomi.

Salah satu faktor ekonomi yang sangat mendukung dan mempengaruhi jalannya roda pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan jalan, transportasi, telekomunikasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk mendongkrak lajunya perekonomian. Penyediaan insfrastuktur selalu menjadi agenda penting

dalam rencana pembangunan indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Dr. Sunyoto Usman berpendapat bahwa infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosiasl budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan sebagai prasarana bagi distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kualitas infrastruktur, baik yang keras fisik (jalan, pelabuhan, irigasi), keras nonfisik (telepon, internet, listrik, air) memainkan peran vital karena merupakan penggerak perekonomian. Infrastruktur berhubungan dengan tiga hal (Hartanto,2004) yaitu : Pertama dukungan dasar bagi pengembangan pabrik/industri, misalnya, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi. Kedua, biaya produksi dan distribusi, baik bahan baku dan produk jadi. Ketiga, keterkaitan dengan pasar dan proses pemasaran. Persoalan lain dalam hal perencanaan dan penyiapan proyek adalah pada partisipasi swasta. Sejak awal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ingin membebankan APBN, tetapi mengharapkan ada partisipasi swasta. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa dari kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp 4.197 triliun, sebesar 55% diharapkan

berasal dari investasi badan usaha swasta. Untuk itu diperlukan dokumen proyek yang layak dan bisa memberikan penjelasan kepada swasta.

Kualitas desain proyek selama ini dianggap kurang meyakinkan para investor untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu desain proyek yang dibuat belum memenuhi standar internasional. Untuk itulah KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) mendapat mandat salah satunya untuk menyiapkan dokumen desain penyiapan proyek berstandar internasional dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau *Outline Business Case* (OBC) dan penetapan skema pendanaan. Dalam dokumen penyiapan proyek tertera berbagai keterangan informasi mengenai proyek, seperti nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat, termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi. Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar (Basri, 2002: 45)

Realisasi anggaran yang terjadi hingga 29 Desember 2023 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total anggaran yang digunakan, dengan presentase realisasi mencapai 97,60%. Meskipun demikian, realisasi anggaran untuk Pemeliharaan Rutin Jembatan mencatat presentase yang lebih rendah,

sebesar 91,27%, sedangkan dua kegiatan lainnya, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, mencatat presentase yang hampir mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah berhasil diserap dan digunakan untuk pembangunan ruas jalan, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam tingkat realisasi antara kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat dinilai dari efektivitas penggunaan anggaran dan implementasi program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data anggaran dan realisasi yang telah disajikan, terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang telah berhasil menyerap sebagian besar alokasi anggaran yang diberikan, dengan presentase realisasi mencapai 97,60%. Hal ini mengindikasikan tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Namun, kinerja organisasi juga harus dilihat dari berbagai variabel lainnya. Mekanisme pengawasan yang efektif dari pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepatuhan terhadap kebijakan anggaran yang berlaku, akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan, yang menyebutkan bahwa peran masyarakat secara tidak langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara tidak langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan yang dilakukan menggunakan berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronik. Seperti tersebut

dibawah ini adalah beberapa contoh laporan dari Masyarakat yang disampaikan melalui call center tentang kondisi jalan yang perlu penanganan :

- Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso), Koordinat : - 7.9120121763110625, 112.64006416681822, Keterangan : ada lubang yg membahayakan pengendara.
- Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso) Koordinat : -7.906299, 112.6134649, Keterangan : depan toko sparepart motor lobang depan makam warga muslim Kedawung, Ngijo, Karangploso, membahayakan roda 2.

Peran masyarakat juga menjadi penting, di mana partisipasi dan pengawasan aktif masyarakat dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang.

Dengan demikian, evaluasi kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian anggaran semata, tetapi juga pada aspek pengawasan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan paparan data realisasi anggaran, sehingga peneliti ingin mengetahui “Analisis Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Malang”

5.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang, maka rumusan masalah tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi dari mekanisme pengawasan, kebijakan anggaran, peran masyarakat dan kinerja organisasi?
2. Apakah mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja organisasi?
3. Apakah kebijakan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi?
4. Apakah peran masyarakat memediasi mekanisme pengawasan terhadap kinerja organisasi?
5. Apakah peran masyarakat memediasi kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini tertuang dalam berikut ini:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan, kebijakan anggaran, peran masyarakat dan kinerja organisasi.
2. Menganalisis pengaruh mekanisme pengawasan terhadap kinerja organisasi.
3. Menganalisis pengaruh kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi.
4. Menganalisis peran masyarakat memediasi mekanisme pengawasan terhadap kinerja organisasi.
5. Menganalisis peran masyarakat memediasi kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seseorang diharapkan akan mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat :

1. Instansi atau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang

Bagi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, termasuk efektivitas mekanisme pengawasan, implementasi kebijakan anggaran, dan peran masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil keputusan dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam memperkuat mekanisme pengawasan. Terakhir, dengan melibatkan masyarakat dalam penelitian ini, instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat memperkuat keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan dan pengawasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi tersebut.

2. Pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang

Penelitian ini diharapkan pegawai dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugas mereka. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus, serta merancang strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan manajemen sumber daya manusia dan dijadikan acuan dalam mengembangkan model teoritis yang lebih terperinci untuk memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hubungan antar variabel mekanisme pengawasan, kebijakan anggaran, peran masyarakat dan kinerja organisasi.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian dibidang ilmu ekonomi dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian lainnya, mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai kinerja organisasi.

5. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang mampu memberikan pelayanan publik terutama pelayanan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan baik, yang pastinya membutuhkan terjalannya kolaborasi dengan masyarakat agar sinergitas dapat tercapai.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Deskripsi pada Variabel dibawah ini dapat dilakukan peningkatan untuk lebih baik lagi dengan indikator penelitian yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, variabel-variabel penelitian ini meliputi:
 - a. Mekanisme pengawasan, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator Pemenuhan standar mutu dan standar teknis, Pemenuhan kelaikan fungsi jalan dan SPM, Capaian umur rencana. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator capaian umur rencana dengan item pernyataan “Apakah Jalan yang telah dibangun mampu mempertahankan kondisinya secara konsisten selama umur rencana yang telah ditetapkan, Apakah Tindakan pemeliharaan rutin dilakukan secara berkala untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi yang mantap selama umur rencana yang telah ditetapkan” sedangkan jawaban responden yang paling rendah terdapat pada indikator Pemenuhan standar mutu dan standar teknis dengan item pernyataan “Apakah Proyek konstruksi jalan yang sedang berlangsung secara konsisten mematuhi standar mutu

yang telah ditetapkan, Apakah Pengawasan terhadap aspek teknis dalam proses konstruksi jalan dilakukan secara teratur dan menyeluruh”.

- b. Kebijakan anggaran, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator Tingkat kepatuhan terhadap prosedur, Akurasi forecasting, Penyaluran anggaran sesuai jadwal, Penggunaan anggaran secara efisien, Transparansi. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator penggunaan anggaran secara efisien dengan item pernyataan “Saya merasa bahwa anggaran digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, Saya percaya bahwa perencanaan penggunaan anggaran yang matang membantu dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal” sedangkan jawaban responden yang paling rendah terdapat pada indikator Tingkat kepatuhan terhadap prosedur dengan item pernyataan “Saya merasa bahwa prosedur yang ada untuk pengelolaan anggaran diikuti dengan baik oleh tim saya, Saya percaya bahwa semua pihak di organisasi ini mematuhi prosedur anggaran yang telah ditetapkan dengan konsisten”
- c. Peran masyarakat, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator Partisipasi dalam Program Pengawasan Jalan, Pelaporan Masalah Jalan, Partisipasi dalam Pertemuan dan Diskusi. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator Partisipasi dalam Pertemuan dan Diskusi dengan item pernyataan “Apakah kehadiran masyarakat dalam pertemuan dan diskusi dapat memperkuat partisipasi publik, Apakah pemerintah seharusnya aktif

melibatkan masyarakat dalam pertemuan diskusi terkait pembangunan jalan” sedangkan jawaban responden yang paling rendah terdapat pada indikator Partisipasi dalam Program Pengawasan Jalan dengan item pernyataan” Apakah masyarakat seharusnya aktif terlibat dalam program pengawasan jalan, Apakah partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keamanan dan kualitas jalan”.

- d. Kinerja organisasi, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator Produktivitas, Kualitas, Ketepatan waktu, Penggunaan sumber daya, biaya. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator biaya dengan item pernyataan “Apakah organisasi berhasil mengelola biaya operasional dengan baik, Apakah organisasi mampu mengontrol biaya agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan”. sedangkan jawaban responden yang paling rendah terdapat pada indikator Ketepatan waktu dengan item pernyataan “Saya dapat menyelesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan, Saya dapat menyelesaikan tugas hari itu juga, tanpa menunggu hari esok”.

2. Mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja organisasi
3. Kebijakan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi
4. Peran masyarakat tidak mampu memediasi mekanisme pengawasan kinerja organisasi

Peran masyarakat mampu memediasi kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andjarwati D. E. 2016. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Fungsi Dan Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Jalan. Jurnal Soses Pekerjaan Umum. Vol 8. No. 1, April 2016. Hal 63-75.
- Anggadini S D. 2016. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.12 No. 1
- Arif, B. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Asariansyah M F, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1141-1150.
- Bastian, I (2011). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (4th ed.). Yogyakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2011). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Batubara Z, Risna R. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109.
- Dewi B. S, Hadiprajitno P. T. B. 2023. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah Kota Surakar. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 12, Nomor 4, Tahun 2023, Halaman 1-7.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gafar T. 2022. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora. Vol.1, No.3 Januari 2022.
- Garrison, R. H. (2012). Akuntansi Manajemen (Manajerial Accounting). Terjemahan Bambang Purnomosidhi dan Erwan Dukat. Yogyakarta: AK Group.
- Harijanto D. 2013. PENGARUH KONFLIK PERAN DAN AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KINERJA PERAWAT MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN EFIKASI DIRI (Studi Pada Perawat di Puskesmas Kabupaten Kediri). Disertasi PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013.

- Haruman, Tendi. 2010. Penyusunan Anggaran Perusahaan, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ibrahim L. 2021. Pengawasan Pemeliharaan Insfrastruktur Di UPT PUPRWilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,). Vol. 2 No. 2 hal.220 - 234
- Jatmiko B. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi Trisakti . Volume. 7 Nomor. 2 September 2020 : 231-246.
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). *General systems theory: Applications for organization and management*. Academy of Management Journal, 15(4), 447-465.
- Kogoya dkk, 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15no. 2 –Juni 2015.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate GovernancePerbankan di Indonesia (draf perbaikan 19 Juli 2013).
- Kumolontang, dkk. 2024. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten minahasa Utara Tahun 2012-2021. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 24 No.1 Januari 2024.
- Lambajang, dkk. 2018 Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”. Vol 9 No. 1, 2018.
- Mahsun, M. dkk. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Nashruddin A Z, Buana C.2021. Analisis Penilaian Kerusakan Jalan dan Perbaikan Perkerasan pada Jalan Raya Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 10, No. 1, (2021)
- Nasution H. A., dkk. 2020. Partisipasi masyarakat tani kelapa sawit dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Parmainan, Kecamatan Hutaraja Tinggi. AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian 8(1) Januari-April 2020 54-60.

- Noor, H. A. (2008). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pardiman, dkk. 2017. The Mediating Role of Social Capital in Islamic Work Ethic, Organizational Commitment, and Lecturer's Performance. *International Review of Management and Marketing*, 2017, 7(5), 113-123.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU.2011, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pramestiningrum D. R, Iramani. 2019. Pengaruh literasi keuangan, financial capital, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja usaha pada usaha kecil dan menengah di jawa timur. *Journal of Business and Banking*. Volume 9 Number 2. November 2019 – April 2020.
- Riyanto M, Kovalenko V. 2023. Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, halaman 374-388.
- Rudianto. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Setyawan B. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia). *JMM Online* Vol. 3 No.12 Desember(2019) 1195-1212.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sudarsono, B. (2019). Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi dengan Efisiensi Anggaran Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 6(1), 12-22..
- Sudrajat A S. 2010. Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturandaerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VII No. 3 September 2010.

- Sutrisno I. Q. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran Daerah. *JURNAL CAKRAWARTI*, Vol. 01, No. 02, Agst 2018- Jan2019
- Tinus A, Ramdhani M. A, Aulawi H. 2023. Pengaruh Kebijakan Anggaran, Sarana Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Garut. *Indonesian Journal of Public Administration and Management (IJPAM)*. Vol 1, No. 1. 2023, Hal. 38-46.
- Uguy R. W. V, Rompis V. S. 2021. Penentuanjenis Pemeliharaan Jalan Dengan Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Ruas Jalan Kelurahan Tondangow Kecamatan Tomohon Selatan). *Jurnal Ilmiah Realtech*Vol. 17 No. 2 Oktober 2021.
- Ulya C, Astuti E. B. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2 2018.
- Umar Z. 2016. Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014. *Jurnal Ilman*, Vol. 4, No. 1, pp. 18-32, Februari 2016, ISSN 2355-1488
- Veronika P, Nugraeni. 2023. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengankonsep Value For Money. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 7 No. 3, 2023.
- Yani A. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi Dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Cendikia Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, 2017.